

TAHUN  
2018



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**BPAD DIY**

**Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 29  
No Telp. (0274) 513969/No. Faks 563367  
Website: [bpad.jogjaprov.go.id](http://bpad.jogjaprov.go.id)**

# Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPAD DIY) Tahun 2018 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018. LKjIP BPAD DIY Tahun 2018 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.


Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Menindaklanjuti dinamika perencanaan Pemerintah Daerah DIY Tahun 2018 serta perubahan Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY pasca disahkannya Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai Januari 2019 BPAD DIY berubah menjadi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY (DPAD DIY). Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang melekat pada manajemen BPAD DIY, sesuai Surat Perintah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No 061/1058 Tahun 2019, Kepala DPAD DIY menghantarkan pertanggungjawaban kinerja BPAD DIY sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPAD DIY Tahun 2018.

Yogyakarta, 18 Februari 2019



KEPALA DPAD DIY

  
Dra. Monika Nur Lastiyani, MM  
NIP 19631207 199003 2 005

# Ikhtisar Eksekutif

---

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) BPAD DIY Tahun 2018 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja BPAD DIY yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra BPAD DIY Tahun 2017-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja BPAD DIY yang dihasilkan di tahun 2018, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1: Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan, dengan indikatornya prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan, capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2018 adalah 101.43%.
- b. Sasaran 2: Meningkatnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi, dengan indikatornya Peningkatan arsip yang dimanfaatkan, capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2018 adalah 100.55%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi DPAD DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Belum banyak kalangan yang memanfaatkan arsip sebagai sumber data.
2. Kesadaran masyarakat untuk menyerahkan arsip statis masih rendah.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana perpustakaan yang sesuai perkembangan IPTEK.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi DPAD DIY dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel .....	v
<b>BAB 1 .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Struktur Organisasi.....</b>	<b>2</b>
<b>1.2 Tugas dan Fungsi .....</b>	<b>3</b>
<b>1.3 Isu-isu Strategis .....</b>	<b>4</b>
<b>1.4 .Keadaan Pegawai .....</b>	<b>9</b>
<b>1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana .....</b>	<b>12</b>
<b>1.6 Keuangan .....</b>	<b>13</b>
<b>1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....</b>	<b>13</b>
<b>BAB 2 .....</b>	<b>16</b>
<b>2.1 Perencanaan Strategis .....</b>	<b>16</b>
<b>2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah .....</b>	<b>17</b>
<b>2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....</b>	<b>20</b>
<b>2.1.3 Strategi dan Arah kebijakan .....</b>	<b>21</b>
<b>2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .....</b>	<b>21</b>
<b>2.3 Rencana Anggaran Tahun 2018 .....</b>	<b>22</b>
<b>2.3.1 Target Belanja BPAD DIY .....</b>	<b>22</b>
<b>2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis .....</b>	<b>22</b>
<b>2.4 Instrumen Pendukung .....</b>	<b>23</b>
<b>BAB 3 .....</b>	<b>24</b>
<b>3.1 Capaian Kinerja Tahun 2018.....</b>	<b>24</b>
<b>3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....</b>	<b>25</b>
<b>3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya .....</b>	<b>29</b>
<b>3.4 Realisasi Anggaran.....</b>	<b>30</b>
<b>3.5 Inovasi .....</b>	<b>32</b>
<b>BAB 4 .....</b>	<b>34</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>35</b>

# Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Distribusi Staf BPAD DIY Tahun 2018 .....	9
Tabel 1. 2 Klasifikasi Golongan PNS BPAD DIY Tahun 2018.....	10
Tabel 1. 3 Klasifikasi PNS BPAD DIY Tahun 2018 berdasarkan gender .....	11
Tabel 1. 4 Klasifikasi PNS BPAD DIY Tahun 2018 berdasarkan jabatan .....	11
Tabel 1. 5 Kondisi Sarana dan Prasarana BPAD DIY Tahun 2018 .....	12
Tabel 1. 6 Pelaksanaan Program Kegiatan BPAD DIY 2018.....	13
Tabel 2. 1 Ringkasan Visi Misi RPJMD DIY 2017-2022 .....	18
Tabel 2. 2 Sasaran Strategis BPAD DIY .....	20
Tabel 2. 3 Strategi, Arah kebijakan.....	21
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	22
Tabel 2. 5 Target Belanja BPAD DIY APBD Perubahan Tahun 2018.....	22
Tabel 2. 6 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis.....	22
Tabel 2. 7 Anggaran Belanja Langsung Pendukung.....	23
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	24
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2018 .....	25
Tabel 3. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	26
Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018.....	26
Tabel 3. 5 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	28
Tabel 3. 6 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 .....	28
Tabel 3. 7 Realisasi Sasaran Strategis dibandingkan Target akhir RPJMD .....	29
Tabel 3. 8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2018 ....	31
Tabel 3. 9 Analisis efisiensi .....	31

# BAB 1

## Pendahuluan

### **Bab 1 Berisi:**

1. *Struktur Organisasi*
2. *Fungsi dan Tugas*
3. *Isu Strategis*
4. *Keadaan Pegawai*
5. *Keadaan Sarana dan Prasarana*
6. *Keuangan*
7. *Sistematika LKj IP*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPAD DIY Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPAD DIY Tahun 2018 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh BPAD DIY.
2. Mendorong BPAD DIY di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPAD DIY untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap BPAD DIY di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 1.1 Struktur Organisasi

BPAD DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BPAD DIY merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yakni Kepala Badan.
2. Unsur Pembantu Pimpinan yakni Sekretariat.
3. Unsur Pelaksana yakni Bidang-bidang.

Susunan Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari :

1. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi
  - b. Subbagian Umum
  - c. Subbagian Keuangan
2. Bidang Pengembangan Perpustakaan , terdiri dari :
  - a. Subbidang Deposit dan Pengelolaan Bahan Pustaka
  - b. Subbidang Pembinaan dan Pemberdayaan
3. Bidang Arsip Dinamis, terdiri dari :
  - a. Subbidang Pengelolaan Arsip Arsip Inaktif
  - b. Subbidang Pembinaan Kearsipan dan Sumberdaya Manusia Kearsipan
4. Bidang Arsip Statis, terdiri dari :
  - a. Subbidang Penelusuran, Akuisisi dan Penyelamatan
  - b. Subbidang Pengelolaan, Perawatan dan Layanan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

**Bagan 1 Struktur organisasi BPAD DIY**



## 1.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Tanggal 2 September 2015 menetapkan bahwa Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program urusan bidang perpustakaan dan kearsipan;
2. Perumusan kebijakan teknis urusan bidang perpustakaan dan kearsipan;
3. Pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan bahan pustaka;
4. Pembinaan perpustakaan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Pengelolaan arsip inaktif dan statis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;



7. Pembinaan kearsipan pada pencipta arsip di lingkungan Pemerintah Daerah dan lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota;
8. Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan dokumen/arsip dan bahan pustaka sebagai warisan budaya;
9. Fasilitasi pengelolaan arsip Kasultanan dan Kadipaten;
10. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja urusan bidang perpustakaan dan kearsipan;
11. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
12. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **1.3 Isu-isu Strategis**

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan disebutkan bahwa Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan /atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan setingkat Provinsi salah satu kewajibannya adalah menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan.

Sedangkan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi masyarakat, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari satuan kerja perangkat daerah provinsi dan penyelenggara pemerintahan daerah, lembaga negara di

daerah provinsi dan kabupaten/kota, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan. Selain itu melakukan pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun, melakukan pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah provinsi dan terhadap lembaga kearsipan daerah kabupaten/ kota.

Sesuai dengan misi Pemda DIY yaitu “Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan pendidikan yang berkarakter yang didukung pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya”, maka diperlukan upaya-upaya yang dapat dilakukan guna melestarikan nilai-nilai tradisional tersebut, salah satunya adalah melalui perpustakaan dan kearsipan dokumen. Hal ini dikarenakan perpustakaan dan kearsipan merupakan wujud nyata dalam upaya pentransformasian nilai-nilai tradisional tersebut melalui bahan pustaka kepada generasi berikutnya. Dengan peningkatan peranan/fungsi perpustakaan dan kearsipan, diharapkan nilai-nilai budaya lokal yang sudah berbentuk secara tertulis menjadi bahan pustaka dapat ditanamkan sedini mungkin pada diri seseorang. Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimilikinya. Perpustakaan memiliki peran strategis untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam rangka untuk mendorong dan menstimulasi masyarakat agar tumbuh minat membaca dan tercipta budaya membaca.

Dewasa ini perkembangan perpustakaan dan kearsipan tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi yang memberikan kemudahan dalam manajemen terutama dalam bidang pengelolaan informasi. Perpustakaan merupakan organisasi publik yang memiliki peran strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Eksistensi dari perpustakaan ini muncul karena adanya kebutuhan masyarakat yang beragam. Sementara itu kegiatan pengolahan arsip dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, akusisi, preservasi,

akses dan layanan perlu juga dikemas dengan suatu sistem tertentu agar dapat dipergunakan secara cepat dan tepat. Kebutuhan masyarakat akan pengelolaan informasi pada perpustakaan dan kearsipan makin lama akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu perpustakaan dan kearsipan harus mampu membangun layanan yang bermutu, yaitu layanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna yang meliputi materi, format, waktu, aturan dan pelayanan. Perpustakaan dan kearsipan harus mampu menjadi media transformasi informasi kepada publik secara prima dalam rangka menjalankan fungsinya. Salah satunya informasi tentang pelestarian budaya. Terkait hal tersebut, dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

#### 1. Peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan

Kualitas Pelayanan perpustakaan mengacu pada pelayanan yang prima yang berorientasi pada kepuasan masyarakat/ pemustaka. Aspek kualitas termasuk didalamnya adalah Sumber Daya Manusia, Bahan Pustaka, Sarana Prasarana pendukung serta pemustaka itu sendiri. Penyederhanaan prosedur yang terkait dengan pelayanan perpustakaan harus dilakukan untuk memberikan pelayanan perpustakaan yang cepat dan tepat. Prasarana pelayanan perpustakaan harus dapat dikembangkan seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Keberadaan gedung perpustakaan yang telah dibangun menjadi asset dalam peningkatan kualitas perpustakaan berkaitan dengan fungsi perpustakaan sebagai sarana edukatif dan rekreatif. Antusiasme masyarakat terhadap perpustakaan berkaitan erat dengan minat masyarakat dalam membaca. Fasilitasi dan motivasi kepada masyarakat harus tetap dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan pemustaka berdasarkan kondisi seperti umur, kewilayahan dll untuk menentukan bentuk intervensi secara tepat.

#### 2. Peningkatan kualitas pelayanan kearsipan

Seperti halnya pelayanan perpustakaan, pelayanan kearsipan juga harus berorientasi pada pelayanan prima, masyarakat mendapatkan manfaat dari arsip-arsip yang telah dikelola. Digitalisasi arsip merupakan terobosan untuk

memberikan informasi melalui arsip secara lebih cepat tetapi dari sisi kelestariannya tetap terjaga. Akuisisi berbagai arsip dari berbagai sumber terutama berkaitan dengan Yogyakarta harus ditingkatkan untuk lebih mengukuhkan Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan kota budaya.

### 3. Pengembangan Perpustakaan

Pengembangan perpustakaan berkaitan dengan peningkatan jumlah perpustakaan dengan memperhatikan persebaran di setiap wilayahnya. Pengembangan perpustakaan di daerah berkaitan erat dengan pengelolaan perpustakaan. Pengelola perpustakaan harus dilakukan oleh individu yang secara profesional melakukan pengelolaan perpustakaan berdasarkan kaidah-kaidah ilmu perpustakaan. Konsekuensinya adalah adanya reward berupa gaji yang tetap untuk setiap pengelola perpustakaan. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak berkaitan dengan digitalisasi perpustakaan melalui Jogja Library for All dengan mengembangkan muatan/content. Pengembangan kerjasama dengan akademisi melalui prodi-prodi perpustakaan dilakukan untuk memperbaiki pengelolaan perpustakaan di Kabupaten/Kota berkaitan dengan transfer ilmu serta pendampingan yang lebih intens untuk menjamin keberlangsungan perpustakaan di Kabupten/Kota khususnya Perpustakaan desa/kelurahan yang bermasalah dalam manajemen pengelolaan dan pengembangannya.

### 4. Pengembangan Kearsipan

Dalam pengembangan kearsipan hal pertama yang harus dilakukan secara lebih adalah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya arsip dan menjadikan pengelolaan arsip sebagai suatu kebutuhan. Pemasarakatan kearsipan harus dilakukan secara lebih menarik untuk menumbuhkan minat masyarakat terhadap arsip.

Pengelolaan arsip diupayakan telah dilakukan sesuai dengan peraturan kearsipan, Pengelola kearsipan haruslah individu yang memahami ilmu tentang arsip dan dilakukan secara profesional bukan sekedar tugas sambilan/sampiran. Konsekuensi faktor kesejahteraan harus mendapatkan perhatian termasuk faktor

kesehatan mengingat pengelolaan arsip mengharuskan pengelola berinteraksi secara intens, pada keadaan tertentu tingkat keasaman kertas akan berpengaruh terhadap kesehatan. Sejumlah isu strategis yang menjadi permasalahan dalam 5 tahun mendatang terutama pasca keluarnya UU No. 43 Thn 2009 Tentang Kearsipan dan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY antara lain sebagai berikut :

a) Pemberian kewenangan terhadap SKPD untuk mengelola arsip aktif dan inaktif yang memiliki retensi di bawah 10 tahun, berarti sejak penciptaan sampai penyusutan. Untuk itu permasalahannya adalah peningkatan kemampuan SKPD dalam pengelolaan arsip aktif dan inaktif. Permasalahan pokok dalam pengelolaan arsip aktif dan inaktif di SKPD adalah belum efektifnya pelaksanaan sistem pengelolaan arsip SKPD, sehingga perlu ditingkatkan pembinaan.

b) Arsip statis sebagai memori kolektif akan diwariskan kepada anak cucu dan generasi yang akan datang. Pokok permasalahan pengelolaan arsip statis di lingkungan Pemda DIY adalah belum terjaminnya keselamatan arsip yang bernilai guna statis yang ada di lingkungan Pemda DIY, swasta, dan perorangan. Di lingkungan SKPD terutama disebabkan karena siklus kearsipan belum dapat dilalui dan dilaksanakan secara sempurna dan simultan sejak penciptaan arsip, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan. Untuk itu upaya penyelamatan arsip statis perlu mendapat prioritas atau penekanan.

c) Arsip Kraton Ngayogyakarta dan Puro Pakualaman merupakan warisan budaya, mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi dan terkait erat dengan sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak bisa dipisahkan dari sejarah Kraton Ngayogyakarta dan Puro Pakualaman. Sejalan dengan pelaksanaan UU No. 13 Thn 2012 tentang Keistimewaan DIY, khususnya terkait dengan pelaksanaan urusan kebudayaan maka pengelolaan arsip Kraton Ngayogyakarta dan Puro Pakualaman perlu mendapat prioritas dan tempat khusus dengan bobot yang lebih besar agar supaya arsip tersebut dapat memberi manfaat yang lebih besar dan menjadi penguatan terhadap keistimewaan DIY.

d) Masalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan arsip tidak memadai, baik mengenai masalah gedung, dan sarana penyimpanan. Tidak memadainya gedung arsip tidak memungkinkan untuk menempatkan sarana penyimpanan arsip seperti roll o'pack, almari arsip foto, almari peta, rak arsip, dan sebagainya sesuai kebutuhan. Gedung arsip yang ada saat ini sudah tidak mampu menampung pertumbuhan arsip serta tidak mampu mengakomodasi kegiatan-kegiatan kearsipan yang dilaksanakan. Untuk itu perlu dipersiapkan sarana dan prasarana yang memadai untuk pengelolaan arsip untuk jangka waktu kurang lebih 20 tahun mendatang. Untuk menjawab permasalahan kearsipan 5 tahun mendatang maka masalah gedung arsip menjadi rioritas dalam Renstra BPAD 2012-2017.

#### 1.4 .Keadaan Pegawai

Pengembangan sumber daya manusia aparatur Pemerintah di lingkungan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY dihadapkan pada permasalahan tidak seimbangnya jumlah dan kualitas personil dengan kebutuhan riil. Kondisi ini menimbulkan kesulitan antara tuntutan peningkatan profesionalisme pegawai dengan keterbatasan pegawai yang potensial. Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY, terhitung sampai dengan akhir tahun 2017 terdapat 117 personil pegawai negeri sipil (PNS) yang terdiri dari 17 pejabat struktural, 24 pejabat fungsional tertentu dan 76 pejabat fungsional umum (staf) dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 1. 1 Distribusi Staf BPAD DIY Tahun 2018**

No	Bagian/Bidang	Jumlah staf	Persentase
1	<b>Sekretariat</b>		
	Subbag. Program, Data, TI	4	3,42%
	Subbag. Keuangan	8	6,84%
	Subbag. Umum	18	15,38%

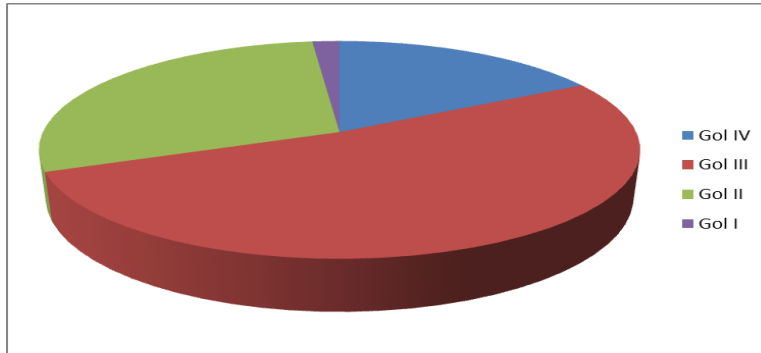
<b>2</b>	<b>Bidang Pengembangan Perpustakaan</b>		
	Subbid. Deposit dan Pengelolaan Bahan Pustaka	6	5,13%
	Subbid. Pembinaan dan Pemberdayaan	5	4,27%
<b>3</b>	<b>Bidang Arsip Dinamis</b>		
	Subbid. Pengelolaan Arsip Inaktif	5	4,27%
	Subbid. Pembinaan Kearsipan dan Sumberdaya Manusia	5	4,27%
<b>4</b>	<b>Bidang Arsip Statis</b>		
	Subbid. Penelusuran, Akusisi dan Penyelamatan	4	3,42%
	Subbid. Pengolahan, Perawatan dan Layanan	3	2,56%
<b>5</b>	<b>Balai Pelayanan Perpustakaan</b>		
	Subbag. Tata Usaha	10	8,55%
	Seksi Pelayanan Perpustakaan	5	4,27%
	Seksi Pelestarian Bahan Pustaka	3	2,56%
<b>6</b>	<b>Pejabat Fungsional Tertentu</b>	24	20,51%
<b>7</b>	<b>Pejabat struktural</b>	17	14,53%
	<b>Jumlah Total</b>	117	100%

Sumber: Bagian Kepegawaian, Subbag Umum BPAD DIY

**Tabel 1. 2 Klasifikasi Golongan PNS BPAD DIY Tahun 2018**

No	Golongan	Jumlah
1	I	2
2	II	34
3	III	61
4	IV	20
	<b>TOTAL</b>	<b>117</b>

Sumber: Subbag Umum BPAD DIY

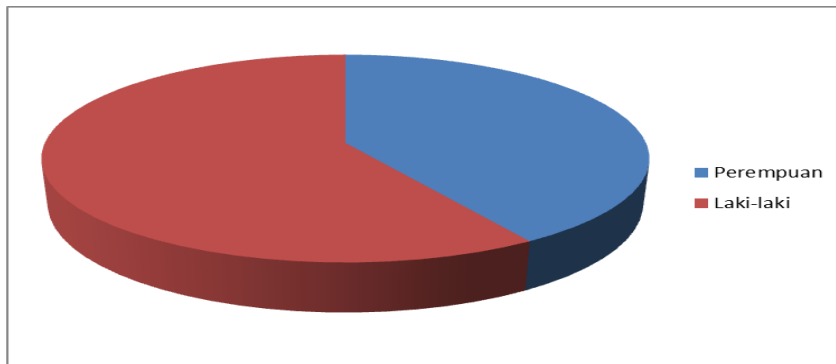


**Bagan 1** Klasifikasi Golongan PNS

**Tabel 1. 3** Klasifikasi PNS BPAD DIY Tahun 2018 berdasarkan gender

No	Pria	Wanita	Jumlah
1	69	48	117

*Sumber: Subbag Umum BPAD DIY*



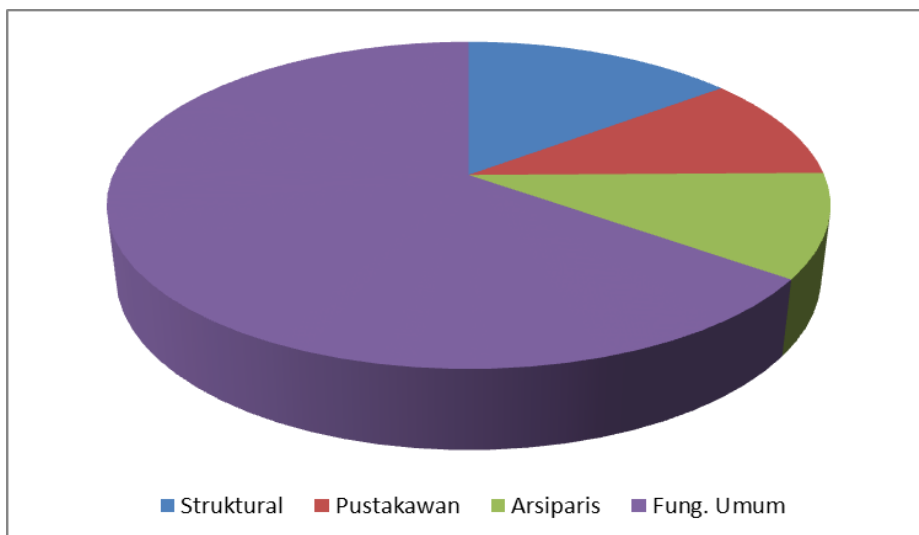
**Bagan 2** Klasifikasi PNS berdasarkan gender

**Tabel 1. 4** Klasifikasi PNS BPAD DIY Tahun 2018 berdasarkan jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	17
2	Fungsional Pustakawan	12
3	Fungsional Arsiparis	12
4	Fungsional Umum	76
	<b>TOTAL</b>	<b>117</b>

*Sumber: Bagian Kepegawaian, Subbag Umum BPAD DIY*





Bagan 3 Klasifikasi PNS berdasarkan jabatan

Jumlah ideal pegawai di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2015 untuk Fungsional Umum sejumlah 74 orang, Fungsional tertentu Arsiparis 20 orang dan Pustakawan 25 orang.

### 1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Selama ini kebutuhan sarana dan prasarana sudah dapat dipenuhi, walau belum tercapai secara optimal. Keterbatasan anggaran menyebabkan prioritas pengadaan sarana prasarana harus dilakukan secara ketat. Adapun rekapitulasi jumlah aset daerah yang ada di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY antara lain:

**Tabel 1. 5 Kondisi Sarana dan Prasarana BPAD DIY Tahun 2018**

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan (Baik/Rusak)
1	Tanah	4	Baik
2	Peralatan dan mesin	7.097	Baik
3	Gedung dan bangunan	6	Baik
4	Jalan, irigasi dan jaringan	1	Baik
5	Aset tetap lainnya	100	Baik
6	Konstruksi dalam pengerjaan	1	Baik
7	Aset lainnya	16	Baik

*Sumber: Bagian Aset, Subbag Umum BPAD DIY*

Jumlah ideal sarana dan prasarana di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2008 dan sudah sebanding dengan beban pekerjaan.

## 1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPAD DIY pada tahun 2018 berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Pada tahun anggaran 2018 BPAD DIY mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 65.047.914.977,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 7.113.050.627,- dan belanja langsung sebesar Rp 57.934.864.350,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran startegis maupun program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp Rp 57.934.864.350,- yang didukung oleh 9 program dan 23 kegiatan. Sedangkan belanja langsung yang berasal dari dana keistimewaan sebesar Rp 2.101.095.100,- yang didukung oleh 1 program dan 1 kegiatan. Alokasi Anggaran BPAD DIY memiliki rincian sebagai berikut:

**Tabel 1. 6 Pelaksanaan Program Kegiatan BPAD DIY 2018**

No	Uraian	Target 2018	Realisasi 2018
1	BELANJA DAERAH	65.047.914.977	62.707.524.970
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.113.050.627	7.000.201.771
	Belanja Pegawai	7.113.050.627	7.000.201.771
3	BELANJA LANGSUNG	57.934.864.350	55.707.323.199

*Sumber: Subbag Keuangan BPAD DIY*

## 1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPAD DIY tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan

sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;

2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKJIP/manfaat LKJIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi BPAD DIY, Potensi yang menjadi ruang lingkup BPAD DIY dan Sistematika penulisan LKj IP.

## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

#### BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

#### LAMPIRAN

# BAB 2

## Perencanaan & Perjanjian Kinerja

### **Bab 2 Berisi :**

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2018*
3. *Rencana Anggaran Tahun 2018*
4. *Instrumen Pendukung*

### **2.1 Perencanaan Strategis**

Memasuki Tahun 2018, BPAD DIY menyusun Rencana Strategis (Renstra) BPAD DIY Tahun 2017-2022. Renstra BPAD DIY merupakan manifestasi komitmen BPAD DIY dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah DIY yang tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra BPAD DIY Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012-2017).

RPJMD Pemerintah Daerah DIY merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di BPAD DIY yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra BPAD DIY Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur DIY No. 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022.

### 2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Misi Gubernur DIY yang dituangkan dalam RPJMD DIY berupaya untuk menyinambungkan perencanaan periode 5 tahun sebelumnya (2012-2017) dengan perencanaan periode yang setelahnya (2017-2022). Visi Misi Gubernur DIY pada perencanaan periode 2017-2022 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode sebelumnya. Gubernur DIY pada Sidang Paripurna Istimewa tanggal 2 Agustus 2017 memaparkan pidato visi misi dengan tema **“Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”**. Pemaparan ini sebagai bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk periode 2017-2022 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur DIY Tahun 2012-2017. Tema visi dalam pemaparan visi misi Gubernur DIY tersebut dilandasi pada aspek kesejahteraan, fenomena-fenomena Kemaritiman terkini (Indian Ocean Rim Association (IORA), Kra-Canal/ Thai Canal Project) serta Kemiskinan di Kawasan Jogja Selatan. Dalam rangka mewujudkan tema visi tersebut, Gubernur DIY menyampaikan misi “Lima Kemuliaan” atau “Panca Mulia”, yakni:

1. terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing,
2. terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,
3. terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan,
4. terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
5. terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung

tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Secara teknokratik, Pidato Visi Misi tersebut kemudian dituangkan dalam RPJMD DIY 2017-2022 dengan Visi :

**“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”**

serta dilaksanakan dengan 2 misi antara lain:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban  
(misi tersebut merangkum Panca Mulia ke-1, 2 dan 3)
2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;  
(misi tersebut merangkum Panca Mulia ke-4 dan 5)

Visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD DIY 2017-2022 sebagai berikut,

**Tabel 2. 1 Ringkasan Visi Misi RPJMD DIY 2017-2022**

Visi: “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia”					
No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	<b>Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban</b>	Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta	Angka IGI (5,59) (2016) menjadi 6,2 (2022)	1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
				1.2. Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat.	Indeks Gini
					Persentase Angka Kemiskinan
				1.3. Meningkatnya Derajat Kualitas hidup sosial masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
1.4. Terpelihara dan Berkembangnya	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya				

Visi: "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia"					
No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
				Kebudayaan	Benda dan Tak benda yang diapresiasi
				1.5. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi.
					IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)
					Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
					Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan
				1.6. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah.	Indeks Williamson
2.	<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis;</b>	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance).	Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai 73,07 (BB) dalam kategori baik (2016) menjadi Sangat Baik dengan nilai 76 (A) (2022)	2.1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK
					Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)
				2.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Prosentase capaian sasaran Pelaksanaan Keistimewaan.
				2.3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan,	bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi



Visi: "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia"					
No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
				Kadipaten dan tanah desa	untuk dikelola serta dimanfaatkan

(Sumber: RPJMD DIY)

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, BPAD DIY mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah Meningkatnya Derajat Kualitas SDM dan Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan dengan indikator capaian sasaran Prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan dan Peningkatan arsip yang dimanfaatkan.

### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

#### Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah BPAD DIY selama 5 tahun anggaran adalah: Meningkatnya pemanfaatan koleksi pustaka dan arsip

#### Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 2 Sasaran Strategis BPAD DIY**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	satuan	Base line 2017	Target tahunan					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan	Prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan	persen	22	23	24	25	26	27	27
2	Meningkatnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	Peningkatan arsip yang dimanfaatkan	berkas	5205	5.750	6.300	6.850	7.300	7.500	7.500

### 2.1.3 Strategi dan Arah kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

**Tabel 2. 3 Strategi, Arah kebijakan**

NO.	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan	Kemudahan Akses layanan untuk mendapatkan informasi dan bacaan masyarakat.	Pengembangan Teknologi Informasi di Bidang Layanan Perpustakaan
		Fasilitas Layanan diperbanyak dan ditingkatkan kualitasnya	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
2	Meningkatnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	Kemudahan Akses layanan untuk mendapatkan informasi khasanah Arsip	Promosi Kearsipan di gencarkan melalui pameran arsip, publikasi dan melalui pemutaran Film Sadar Arsip
			SIKS yang terintegrasi dengan Kabupaten/Kota dioptimalkan

### 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja BPAD DIY Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN AN	TRIWUL AN	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan	Prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan	persen	23	TW I TW II TW III TW IV	22,25 22,5 22,75 23
2	Meningkatnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	Peningkatan arsip yang dimanfaatkan	berkas	5.750	TW I TW II TW III TW IV	2.000 3.500 5.500 5.750

### 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2018

Pada Tahun Anggaran 2018 BPAD DIY melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 64.440.764.328,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 7.390.899.378,- dan Belanja Langsung Rp 57.049.864.950,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2018 menjadi Rp 65.047.914.977,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 7.113.050.627,- dan Belanja Langsung Rp 57.934.864.350,-.

#### 2.3.1 Target Belanja BPAD DIY

**Tabel 2. 5 Target Belanja BPAD DIY APBD Perubahan Tahun 2018**

Uraian	Target	Prosentase
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	Rp. 7.113.050.627,-	10.94%
<b>Belanja Langsung</b>	Rp. 57.934.864.350,-	89.06%
<b>Jumlah</b>	Rp. 65.047.914.977,-	100%

#### 2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2018 BPAD DIY yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 6 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis**

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan	9.525.648.650	16.44%	Terdiri dari 3 Program: yakni program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan,

				Program Pengembangan Bahan Pustaka dan Informasi, Program Layanan Perpustakaan
2	Meningkatnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	2.090.648.500	3.6%	Terdiri dari 2 Program: Program Perlindungan dan Konservasi Arsip, Program Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan

## 2.4 Instrumen Pendukung

Untuk mendukung tercapainya sasaran, BPAD didukung oleh program 01-06 pada tahun 2018. Rincian capaian program 01-06 pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 7 Anggaran Belanja Langsung Pendukung**

No.	Progra,	Anggaran	Realisasi	Persen
1	2	3	4	5
1	Program administrasi Perkantoran	5.715.718.050	5.227.797.064	91.46
2	Program peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	39.891.946.600	38.858.533.550	97.41
3	Program peningkatan Kapasitas sumberdaya Aparatur	103.768.550	103.758.500	99.99
4	Program peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian Kinerja dan pelaporan Keuangan	607.134.000	593.800.555	97.80

Selain itu BPAD DIY juga melakukan sejumlah upaya diantaranya melakukan publikasi melalui pameran, media masa, Radio maupun elektronik dan melakukan publikasi dan promosi yang dilaksanakan melalui Pameran, sosialisasi dan implementasi Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) maupun adanya Gerakan Masyarakat Sadar Arsip.

# BAB 3

## Akuntabilitas Kinerja

### **Bab 3 Berisi :**

1. *Capaian Kinerja Tahun 2018*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
4. *Realisasi Anggaran*
5. *Inovasi*

### **3.1 Capaian Kinerja Tahun 2018**

BPAD DIY telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja BPAD DIY tahun 2018 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

**Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPAD DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPAD DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan	Prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan	persen	23	23.33	101.43	Sangat baik
2	Meningkatnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	Peningkatan arsip yang dimanfaatkan	berkas	5.750	5.782	100.55	Sangat baik

Dari tabel di atas, terdapat dua sasaran strategis yang terbagi ke dalam dua indikator. Pada tahun 2018, dua indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100% dari total indikator. Capaian yang tertinggi pada indikator Meningkatkan jumlah pemustaka ke perpustakaan dengan persentase 101.43%, sementara indikator Meningkatkan pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi memperoleh capaian sebesar 100.55%.

### **3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis BPAD DIY yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

#### **3.2.1 Sasaran meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan**

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan diukur dengan satu indikator. Indikator tersebut yaitu indikator: Prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan	Prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan	Peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan dibagi jumlah penduduk usia potensial membaca

Kinerja sasaran Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan dengan indikator Prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan pada tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018**

No	Indikator Sasaran	Baseline 2017	2018			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2018 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan	22	23	23.33	101.43	27	86.4

*Keterangan kolom (6): Ada peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan 0.33% dari target yang direncanakan 23 persen. Nilai absolut pengunjung Perpustakaan pada tahun 2018 sebesar 738.757 pemustaka. Sedangkan jumlah penduduk usia potensial DIY sebanyak 3.166.200 orang. Sehingga persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan tahun 2018 adalah jumlah pengunjung perpustakaan dibagi dengan jumlah penduduk usia potensial dikali 100% hasil yang diperoleh adalah sebesar 23.33%.*

Dari tabel di atas, jumlah persentase yang didapat sudah melebihi target yang dicanangkan pada tahun 2018 sebesar 23%. Indikator Prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan ditunjang oleh aktivitas memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat, yakni: layanan menetap, layanan perpustakaan

keliling juga layanan Pojok Baca. Tujuan utamanya adalah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan dan mengakses koleksi perpustakaan.

Target Prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan pada tahun 2018 ini ditetapkan sebesar 23%. Realisasi hingga tahun 2018, terdapat 738.757 pemustaka yang mengakses layanan perpustakaan. Sementara itu, jumlah penduduk berusia produktif (dalam hal ini berusia 5-65 tahun) di DIY pada tahun 2018 terdapat sebanyak 3.166.200 jiwa. Sehingga berdasarkan formulasi meta indikator, prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan pada tahun 2018 didapat dengan membagi jumlah pemustaka pada tahun 2018 dengan jumlah penduduk berusia produktif pada tahun n (2018) dikali 100%, angka yang diperoleh adalah 23,33%.

Untuk Capaian Tahun 2017 sebagai pembandingan capaian Tahun 2018 yang juga merupakan baseline dari indikator sasaran ini ditetapkan sebesar 22% dengan jumlah pemustaka tercatat terdapat 512.057 pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan. Pada tahun 2018, terdapat peningkatan jumlah pemustaka sebesar 226.700 pemustaka yang menjadikan persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan pada tahun 2018 ini dapat melampaui target yang ditetapkan sebesar 23%.

Capaian indikator Prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan hingga tahun 2018 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra ini sudah mencapai 86,4%. Pada tahun 2018 capaian indikator sudah mencapai 23,33% sedangkan pada tahun akhir Renstra indikator Prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan ini dicanangkan sebesar 27% pada tahun 2022.

Faktor yang mendukung capaian kinerja tahun 2018 ini adalah adanya publikasi yang gencar dilaksanakan di luar maupun di dalam misalnya melalui pameran, media massa seperti Radio maupun media elektronik sehingga target kinerja tahun 2017 dapat dicapai dengan baik. Di samping itu juga terdapat Layanan Perpustakaan Keliling yang dilaksanakan seminggu sekali di 10 lokasi yang tersebar di Kabupaten/Kota, Layanan Pojok Baca di 10 titik lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat yaitu: RSUP Dr. Sardjito, RS. YAP, RS. Bethesda, RS. PKU Muhammadiyah Gamping, RSUD Kota Yogyakarta, SAMSAT Yogyakarta, SAMSAT Kulon Progo, Pengadilan Negeri Yogyakarta, BPJS Kesehatan, Kantor Pajak Pratama.

Selain itu, juga adanya berbagai fasilitas Layanan Perpustakaan di "Grhatama Pustaka" Balai Layanan Perpustakaan yang mulai melaksanakan layanan pada tanggal 4 Januari 2016. Pengunjung di Grhatama Pustaka sebagian besar



adalah mahasiswa, pelajar, anak-anak dan masyarakat. Bahkan hampir setiap hari ada saja yang melaksanakan studi banding di Grhatama Pustaka secara berombongan dengan menggunakan Bus, sebagian besar mereka berasal dari dalam dan luar Jawa. Grhatama Pustaka memberikan berbagai fasilitas layanan perpustakaan kepada masyarakat dalam meningkatkan pengembangan minat baca dan kunjungan ke perpustakaan dengan berbagai fasilitas yang ada.

### 1.2.2 Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Arsip Sebagai Sumber Informasi

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Arsip Sebagai Sumber Informasi diukur dengan satu indikator. Indikator tersebut yaitu indikator: Peningkatan arsip yang dimanfaatkan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 5 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	Peningkatan arsip yang dimanfaatkan	peningkatan jumlah arsip yang dimanfaatkan dalam tahun n

Kinerja sasaran Meningkatnya Pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi dengan indikator Peningkatan arsip yang dimanfaatkan pada tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3. 6 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018**

No	Indikator Sasaran	Baseline 2017	2018			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2018 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan arsip yang dimanfaatkan	5.205	5.750	5.782	100.55	7.500	77.09

*Keterangan kolom (6): Ada peningkatan jumlah arsip yang dimanfaatkan sebesar 0.55% dari target yang direncanakan 5.750 berkas. Nilai absolut arsip yang dimanfaatkan pada tahun 2018 sebesar 5.782 berkas. Dari jumlah total arsip yang dimanfaatkan pada tahun 2018 tersebut mayoritas berasal dari Arsip Jawatan Pemerintah Umum, dan juga berasal dari arsip kraton dan puro pakualaman.*

Dari tabel di atas, jumlah arsip yang dimanfaatkan pada tahun 2018, mengalami peningkatan sebesar 0,55% dari target yang dicanangkan pada tahun 2018 sebesar 5.750 berkas. Faktor yang mendorong capaian kinerja tahun 2018 ini adalah mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat/lembaga dalam menyerahkan arsipnya ke BPAD DIY selaku LKD Provinsi sehingga target kinerja tahun 2018 dapat dicapai dengan baik. Sedangkan untuk Capaian Tahun 2017 sebagai pembandingan capaian Tahun 2018 sekaligus sebagai baseline indikator dalam Renstra BPAD DIY, dicanangkan sebesar 5.205 berkas, berkas arsip yang dimanfaatkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 577 berkas. Sehingga capaian indikator pada tahun 2018 ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2017.

Capaian indikator jumlah arsip yang dimanfaatkan hingga tahun 2018 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra ini sudah mencapai 77,09%. Pada tahun 2018 capaian indikator sudah mencapai 5.782 berkas sedangkan pada tahun akhir Renstra indikator jumlah arsip yang dimanfaatkan ini dicanangkan sebesar 7.500 berkas pada tahun 2022.

Faktor lain yang mendorong capaian kinerja tahun 2018 ini adalah adanya publikasi dan promosi yang dilaksanakan melalui Pameran, penerapan SIKS dan juga adanya Gerakan Masyarakat Sadar Arsip sehingga target kinerja tahun 2018 dapat dicapai dengan baik.

### 3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

Dari capaian indikator yang sudah disampaikan di atas jika dibandingkan antara capaian tahun 2018 dan akhir tahun RPJMD sebagai berikut:

**Tabel 3. 7 Realisasi Sasaran Strategis dibandingkan Target akhir RPJMD**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Baseline 2017	Capaian/kondisi 2018	2022	
					Target akhir RPJMD	Capaian thd akhir RPJMD
1.	Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan	Prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan	22	23,33	27	86,4%

2.	Meningkatnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	Peningkatan arsip yang dimanfaatkan	5.205	5.782	7.500	77,09%
----	---	-------------------------------------	-------	-------	-------	--------

Dari kedua indikator kinerja yang ditargetkan pada tahun 2018, keduanya sudah memenuhi target RPJMD. Untuk indikator Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan baseline tahun 2017 sebagai pembanding capaian Tahun 2018 adalah sebesar 22% sementara itu untuk indikator Meningkatnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi baseline capaian adalah sebesar 5.205 berkas.

Capaian kedua indikator mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Yakni sebesar 1,33 persen pada sasaran meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan dan 577 berkas pada sasaran meningkatnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sasaran pertama hingga tahun 2018 ini mencapai 86,4% sedangkan sasaran kedua mendapat capaian sebesar 77,09%.

### 3.4 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 96.16%. dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 94,04%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 96,69%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi (95,66%). Sedangkan penyerapan pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan (93,68%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2018 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3. 8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2018**

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Targ et	Reali sasi	% Reali sasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realis asi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatn ya jumlah pemustaka ke perpustakaa n	Prosentase peningkata n jumlah pemustaka ke perpustaka an	23	23,33	101,4 3	9.525.648. 650	8.923.615. 180	93,68
2	Meningkatn ya pemanfaata n arsip sebagai sumber informasi	Peningkatan arsip yang dimanfaatk an	5.75 0	5.782	100,5 5	2.090.648. 500	1.999.818. 350	95,66
3	Program pendukung	Program 01- 06	100	100	100	46.318.56 7.200	44.783.88 9.669	96,69
<b>Total Belanja Langsung</b>						<b>57.934.86 4.350</b>	<b>55.707.32 3.199</b>	<b>96,16</b>

**Tabel 3. 9 Analisis efisiensi**

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan	Prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan	101,43	93,68	6,32%

2	Meningkatnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	Peningkatan arsip yang dimanfaatkan	100,55	95,66	4,34%
---	---	-------------------------------------	--------	-------	-------

#### Analisis Efisiensi

Dari dua Sasaran strategis, terdapat dua sasaran yang kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut:

1. Sasaran meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan Telah mencapai kinerja sebesar 101.43% dengan efisiensi anggaran 6,32%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui efisiensi pengadaan pihak ketiga dan sejumlah perjalanan dinas luar daerah.
2. Sasaran Meningkatnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi Telah mencapai kinerja sebesar 100,55% dengan efisiensi anggaran 4,34%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui efisiensi pengadaan pihak ketiga dan sejumlah perjalanan dinas luar daerah.

### 3.5 Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah DIY untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY diwajibkan untuk melakukan inovasi. Komitmen inovasi tersebut tertuang dalam Surat Edaran SE Gubernur DIY No. 065/12017 Tahun 2015 tentang Inovasi Pelayanan Publik yang mendorong *"one agency, one innovation"*. Inovasi yang diemban oleh Perangkat Daerah ditujukan juga untuk mencapai keberhasilan capaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan Pada tahun 2018 ini, BPAD DIY Telah menginisiasi inovasi, sebagai berikut:

1. Kegiatan restorasi arsip gratis ke masyarakat yang diselenggarakan pada pameran arsip yang dilaksanakan di Sasana Hinggil, Alun-alun Kidul.

Kegiatan ini memudahkan masyarakat yang memiliki arsip yang rusak untuk bisa diperbaiki secara gratis.

2. Silang pinjam Jogja Library for All (JLA). Silang pinjam ini memudahkan pemustaka untuk meminjam buku dari beberapa perpustakaan tanpa perlu hadir secara fisik dengan hanya menggunakan satu anggota JLA.
3. Inovasi perpustakaan digital, iJogja. iJogja adalah aplikasi perpustakaan digital persembahan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. iJogja merupakan aplikasi perpustakaan digital berbasis media sosial yang dilengkapi dengan eReader untuk membaca ebook. Dengan fitur-fitur media sosial Anda dapat terhubung dan berinteraksi dengan pengguna yang lain. Anda dapat memberikan rekomendasi buku yang sedang Anda baca, menyampaikan ulasan buku serta mendapatkan teman baru. Membaca ebook di iJogja jadi lebih menyenangkan karena Anda dapat membaca ebook secara online maupun offline.

# BAB 4

## Penutup

### **Bab 5 Berisi :**

1. *Kesimpulan*
2. *Rencana Tindak Lanjut*

Penyelenggaraan kegiatan di BPAD DIY pada Tahun Anggaran 2018 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis BPAD DIY Tahun 2017-2022. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja BPAD DIY tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis kedua sasaran, terdapat dua indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2018, dua indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100% dari total indikator.
2. Dari dua indikator sasaran pada tahun 2018, untuk sasaran Meningkatkan jumlah pemustaka ke perpustakaan realisasinya 23,33%, untuk sasaran Meningkatkan pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi realisasinya 5.782 berkas. Hal ini akan terus di pertahankan serta ditingkatkan untuk periode tahun selanjutnya.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Peningkatan promosi dan sosialisasi terkait layanan baik itu perpustakaan dan arsip sehingga dapat membantu tercapainya indikator sasaran strategis di tahun yang akan datang.
2. Peningkatan sarana prasarana kearsipan. Dalam hal ini pembangunan gedung depo arsip, untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan dan juga pelayanan arsip sehingga dapat mendukung tercapainya sasaran strategis di tahun mendatang.

## **LAMPIRAN**

Lampiran 1. Struktur Organisasi

Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya

Lampiran 5. Surat Perintah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Lampiran 6. Penghargaan yang pernah diterima